

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Infrastruktur

Infrastruktur fisik dan sosial dapat diartikan sebagian kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik (Sullivan, Arthur, dan Steven M. S: 2003 dan *Oxford Dictionary*). Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan elemen infrastruktur seperti fasilitas jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah perlistrikan telekomunikasi, dan pelabuhan secara fungsional.

Selain itu infrastruktur dapat juga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, terutama distribusi aliran produksi barang dan jasa. Sebagai salah satu contoh, jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik, dari pabrik kemudian berlanjut untuk didistribusikan ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.

2.2 Sistem infrastruktur

Menurut Grigg dalam Kodoatie (2003:8), sistem infrastruktur merupakan merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi

yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Grigg dalam Kodoatie (2003:101), mengatakan pula bahwa infrastruktur juga dapat dikelompokkan menjadi 13 kategori yakni:

- 1) Sistem penyediaan air: waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengelolaan air (*treatment plant*)
- 2) Sistem pengelolaan air limbah: pengumpulan, pengolahan, pembuangan, daur ulang
- 3) Fasilitas pengelolaan limbah padat
- 4) Fasilitas pengendali banjir, berupa drainase dan irigasi
- 5) Fasilitas lintas air dan navigasi
- 6) Fasilitas transportasi: jalan, rel, bandar udara. Termasuk didalamnya adalah tanda-tanda lalu lintas, fasilitas pengontrol
- 7) Sistem *transit public*
- 8) Sistem kelistrikan produksi dan distribusi
- 9) Fasilitas gas alam
- 10) Gedung publik: sekolah, rumah sakit
- 11) Fasilitas perumahan publik
- 12) Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion
- 13) Komunikasi

2.3 Krisis infrastruktur

Krisis infrastruktur juga dapat diartikan sebagai situasi maupun kondisi yang merupakan titik balik (*turning point*) yang dapat membuat infrastruktur tersebut akan menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Penyebab-penyebab dari krisis infrastruktur tersebut menurut Grigg dalam Kodoatie (2003) yaitu:

- 1) Kegagalan pembuatan (modal, desain, konstruksi/teknologi)
- 2) Runtuh (ambruk, teknologi)
- 3) Rusak/aus (umur, pemakaian, salah pakai)
- 4) Bencana alam (banjir, gempa, kebakaran)
- 5) Tidak ada penambahan/penyesuaian (kapasitas kurang)
- 6) Tidak ada/minim pemeliharaan

Adapun penyebab dari kesalahan manajemen yakni:

- 1) Pemotongan anggaran/investasi kurang
- 2) Kesalahan pemilihan infrastruktur
- 3) Pemakaian melewati umur/*life-cycle* tidak diperhatikan
- 4) Kecenderungan mengabaikan pemeliharaan
- 5) Mahalnya teknologi baru

Dari uraian tentang penyebab terjadinya krisis dalam kelayakan infrastruktur diatas, sistem manajemen dalam hal ini juga berpengaruh besar terhadap perkembangan suatu infrastruktur. Oleh karena itu akan lebih baik jika

suatu infrastruktur selalu diperhatikan kelayakannya agar tidak terjadinya krisis dalam bidang infrastruktur.

2.4 Sistem manajemen infrastruktur

Manajemen merupakan suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manajemen yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya tersebut menurut Grigg dalam Kodoatie (2003) biasa juga disebut dengan 5M yaitu:

- 1) *Men* (manusia)
- 2) *Materials* (bahan)
- 3) *Machines* (peralatan/mesin)
- 4) *Methods* (cara kerja/metode)
- 5) *Money* (modal)

Proses – proses yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Perencanaan investasi (*investment planning*);
- 2) Perancangan (*designing*);
- 3) Pelaksanaan konstruksi (*construction*);
- 4) Pemakaian/penggunaan (*operation*), pemeliharaan (*maintenance*);
- 5) Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (*evaluation*) tingkat pelayanan infrastruktur, meliputi :
 - a) Sistem manajemen pemeliharaan.
 - b) Sistem manajemen operasi.
 - c) Sistem pendukung keputusan.

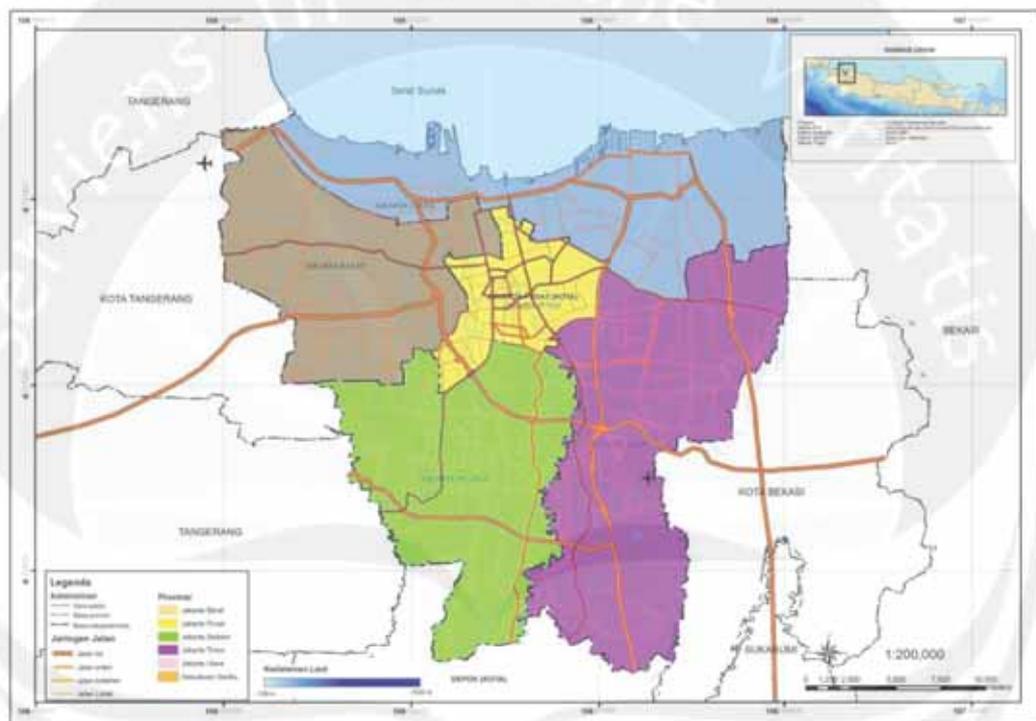
- d) Sistem manajemen kerja & organisasi.
- e) Rencana dan program kerja.
- f) Kepala pengoperasian.
- g) Budget.
- h) Sistem manajemen finansial.
- i) Sistem manajemen proyek.
- j) Sistem infrastruktur.

Menurut Didik Purwanto (2012), kualitas infrastruktur Indonesia dinilai terendah kedua diantara negara-negara se-Asia, dan hanya lebih baik dari Filipina. Kualitas infrastruktur Indonesia hanya memperoleh nilai peringkat 92, sedangkan Filipina memperoleh peringkat 98. Nilai itu dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur berupa kondisi jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara dan listrik. Dari sektor tertinggi, Indonesia hanya memperoleh nilai 3,4 untuk jalan, 3,2 untuk rel kereta api, 3,6 untuk pelabuhan, 4,2 untuk bandara, dan 3,9 untuk listrik. Rata-rata nilai tersebut adalah 3,7. Kualitas infrastruktur India, China, Thailand, Malaysia dan Singapura memiliki peringkat yang tinggi. India memiliki peringkat ke-87, China ke-69, Thailand ke-49, Malaysia ke-29 dan Singapura ke-2.

Dibanding laporan pada tahun 2011-2012, peringkat kualitas infrastruktur Indonesia cenderung menurun. Sebelumnya, Indonesia masih diperingkat ke-82, sementara Filipina masih diperingkat ke-113, India ke-86, China ke-69, Thailand ke-47, Malaysia ke-23, dan Singapura tetap di peringkat ke-2. Rasio

anggaran infrastruktur terhadap seluruh anggaran belanja untuk Indonesia adalah 2,1 dalam persen (%). Hal ini berkaitan dengan nilai rendah dari infrastruktur Indonesia.

2.5 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Gambar 2.1 Peta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jakarta adalah Ibukota Negara Indonesia. Sebagai Ibukota, Jakarta menjadi provinsi yang istimewa sehingga disebut sebagai Daerah Khusus Ibukota. Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur, Kota Depok Provinsi Jawa Barat di selatan, dan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten di sebelah barat.

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah dan 1 kabupaten, yakni: Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km², Jakarta Utara dengan luas 142,20 km², Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km², dan Jakarta Timur dengan luas 187,73 km², serta Kabupaten Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km². Secara keseluruhan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari 1 kabupaten, dan 5 kota, serta 42 kecamatan. (data.jakarta.go.id, 23 Juni 2015)

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Kepadatan penduduk ini sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang baik. Pembangunan infrastruktur harus mencakup semua ruang lingkup, termasuk sarana transportasi, sarana rekreasi, sarana kesehatan, sarana komunikasi dan informasi, serta sarana pendidikan. Beberapa di antaranya dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

a. Transportasi Darat

Transportasi darat sebagai penunjang mobilitas orang dan barang di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tiap tahun terus meningkat baik dari segi jumlah maupun pelayanannya. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk sehingga menyebabkan bertambahnya kebutuhan ruas jalan. Adapun jumlah ruas jalan yang tersedia di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut: jalan nasional tol 123,481 km, jalan nasional negara 142,647 km dan jalan provinsi 6598,788 km (data.jakarta.go.id, 23 Juni 2015). Selain itu juga terdapat

41 stasiun dan 19 terminal bus yang tersebar di berbagai Kota dan Kabupaten di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (anekainfojakarta.blogspot.co.id).

b. Transportasi Laut

Transportasi laut memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung kelancaran arus orang, barang, dan jasa di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan di sebelah Utara Propinsi DKI Jakarta ini merupakan pelabuhan tersibuk dan terbesar di Indonesia. Tidak hanya mengangkut penumpang, aktivitas di pelabuhan ini juga padat dengan angkutan barang yang masuk dari luar pulau dan luar negeri.

c. Transportasi Udara

Transportasi udara di Daerah Khusus Ibukota Jakarta melayani penerbangan domestik maupun internasional. Bandara Halim Perdanakusuma adalah bandara yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bandara ini melayani rute penerbangan domestik dan bandar udara ini juga digunakan sebagai markas Komando Operasi Angkatan Udara I (Kops AU I) TNI AU I. Bandara ini terletak di Bilangan Jakarta Timur. Bandara Halim Perdanakusuma beroperasi sebagai bandara komersial mulai tanggal 10 Januari 2014 (halimperdanakusuma-airport.co.id), di mana sebelumnya hanya digunakan untuk penerbangan pemerintahan dalam negeri maupun luar negeri. Sementara ini penerbangan internasional dilakukan di Bandar Udara Soekarno-Hatta yang terletak di Tangerang Provinsi Banten. Dalam penilaian infrastruktur ini bandar

udara Soekarno-Hatta masuk dalam penilaian dikarenakan bandar udara tersebut menjadi akses keluar masuk warga dalam negeri maupun luar negeri menuju Ibukota Jakarta. Dari tahun 1984 hingga tahun 2015 bandar udara tersebut milik Pemrov DKI Jakarta, selama itu pajak dan retribusi dari bandara masuk ke Pemrov DKI Jakarta (bisnis.liputan6.com, 3 Februari 2016).

d. Sarana Rekreasi

Jakarta menyediakan banyak sarana untuk rekreasi seperti: wisata alam, wisata berbelanja, edukasi, serta lain sebagainya. Beberapa diantaranya adalah: Kepulauan Seribu, Grand Shopping Town Indonesia, Wisata Setu Babakan, Wisata Taman Ragunan, Museum Bank Indonesia, Taman Wisata Kota Tua, TMII – Taman Mini Indonesia Indah, dan Taman Impian Jaya Ancol. (forum.kompas.com, 18 Agustus 2015).

Jakarta yang dipenuhi ‘hutan beton’, juga memiliki lahan taman yang nyaman. Pembangunan taman saat ini cukup banyak dikarenakan kebutuhan untuk rekreasi warga ibukota yang cukup tinggi. Diantara banyak taman ada beberapa taman yang menjadi primadona warga Jakarta seperti: Tamana Ayodya yang terletak di Jakarta Selatan, Taman Ria Rio yang terletak di Jakarta Timur, Taman Menteng di Jakarta Pusat, Taman Suropati, dan Taman Situ Lembang (m.tempo.co, 22 Juni 2015).

e. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang dimiliki Jakarta saat ini sudah banyak, mulai dari klinik, puskesmas, rumah sakit khusus maupun rumah sakit umum. Meski demikian, belum banyak RSUD yang dimiliki pemerintah. Hingga kini baru ada 5 RSUD yang dimiliki pemerintah, yaitu RSUD Cengkareng, RSKD Duren Sawit, RSUD Koja, RSUD Pasar Rebo, dan RSUD Tarakan. Jumlah yang sedikit ini belum mampu menampung kebutuhan warga Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta mempunyai tujuan memperbanyak Rumah Sakit milik Pemerintah supaya pelayanan dan pengurusan BPJS (Sebelumnya Jamkesmas) dan kartu Jakarta Sehat semakin mudah. (sehat.link, 06 januari 2015).

f. Sarana Komunikasi dan Informasi

Ibukota negara sedang banyak berbenah. Sejak Era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan kini dibawah komando Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Jakarta memang banyak berubah. Perubahan yang ditandai dengan berbagai terobosan dipelbagai lini ini sudah banyak terlihat dan sampai saat ini pun masih terus dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan ibukota menjadi kota yang nyaman dan menyenangkan bagi warganya. Sebuah terobosan yang telah dilakukan baru-baru ini adalah peluncuran aplikasi SwaKita. SwaKita sendiri adalah aplikasi media sosial pemantau lingkungan berbasis peta yang dirancang khusus untuk menunjang fungsi pemerintahan seperti camat, dan lurah sebagai urban manager dalam juga untuk

melayani masyarakat, seperti menanggapi keluhan dan saran masyarakat, pengumuman, kegiatan wilayah, dan lainnya. (www.maxmanroe.com, 2015)

Pada tanggal 15 Desember 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meresmikan Jakarta *Smart City*. Keberadaan program Jakarta *Smart City* diharapkan akan mempermudah Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan informasi kondisi Jakarta ke masyarakat dan mempermudah kinerja aparat Pemprov DKI agar cepat merespon keluhan dari warga. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov DKI juga membentuk Unit Pengelola Jakarta *Smart City* yang bertujuan untuk mewujudkan Jakarta Baru yang informatif dan transparan serta mendukung kolaborasi melalui pemanfaatan teknologi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik. (www.jakarta.go.id, 16 Februari 2016).

g. Sarana Pendidikan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui masih banyak kelemahan dalam sistem pendidikan di Ibu Kota di Jakarta masih banyak anak putus sekolah, yang akhirnya membentuk geng yang berpotensi melakukan berbagai tindak kekerasan dan kriminal. Seperti diketahui, Pemprov DKI telah lama meluncurkan bantuan dana pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) (news.okezone.com, 15 Desember 2015)

Pendidikan di Jakarta masih kurang merata karena mutu pendidikan tiap sekolah memiliki kualitas yang berbeda. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta guru di sekolah unggulan tukar mutasi dengan guru di sekolah yang minim prestasi. Guru dari sekolah unggulan diharap mampu meningkatkan

kualitas pendidikan sekolah tempatnya dimutasi. Sehingga, kualitas pendidikan seluruh sekolah di Jakarta akan merata (www.beritajakarta.com, 14 Mei 2016). Saat ini terdapat 120 Akademi, 13 Politeknik, 198 Sekolah Tinggi, 21 Institusi, dan 57 Universitas yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (orlap.ristekdikti.go.id).

